

**Judul** : Pemda Masih Dibayangi Ketidakpastian Fiskal  
**Tanggal** : Selasa, 26 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

## DANA TRANSFER DAERAH

# Pemda Masih Dibayangi Ketidakpastian Fiskal

**JAKARTA, KOMPAS** — Setelah sempat dipangkas pada 2026, pemerintah membuka peluang kenaikan transfer ke daerah atau TKD pada 2027 dengan pagu indikatif Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun. Rentang yang lebar itu mencerminkan fleksibilitas fiskal pemerintah di tengah tekanan penerimaan negara, tetapi sekaligus menunjukkan masih tingginya ketidakpastian fiskal bagi pemerintah daerah.

Pagu indikatif TKD 2027 tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. "Pagu indikatif TKD pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 710 triliun sampai Rp 810 triliun, dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap kebijakan strategis pemerintah, *outlook* pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran pelayanan dasar publik daerah, serta kemampuan keuangan negara," demikian tertulis dalam dokumen tersebut sebagaimana dikutip pada Senin (25/5/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rentang pagu indikatif TKD 2027 tersebut lebih lebar dibandingkan pagu indikatif TKD 2026 yang berada pada kisaran Rp 712,3 triliun hingga Rp 745,3 triliun. Namun, dalam implementasi-

nya, alokasi TKD dalam APBN 2026 justru turun menjadi Rp 693 triliun.

Pemerintah beralasan penyesuaian dilakukan karena penyerapan anggaran daerah dinilai belum optimal, sementara belanja daerah juga diangap belum efisien dan belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan alokasi TKD 2026 tersebut tergolong cukup tajam. Dalam APBN 2025, alokasi TKD tercatat mencapai Rp 848 triliun.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin berpandangan, pagu indikatif TKD 2027 sebesar Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun relatif tidak jauh berbeda dibandingkan alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp 848 triliun dan sedikit lebih tinggi dibandingkan alokasi TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Menurut Khozin, karena masih bersifat indikatif, angka tersebut masih dapat berubah dalam proses pembahasan APBN. Namun, jika melihat rentang nilainya, pagu indikatif TKD 2027 dinilai cenderung stagnan, terutama apabila dikaitkan dengan asumsi penyesuaian kondisi makroekonomi tahun depan.

**Kalau penerimaan negara membaik, TKD mungkin akan mendekati batas paling atas.**

### Kendali di pusat

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai rentang TKD 2027 menunjukkan dua sinyal sekaligus dari pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah dinilai mulai membuka fleksibilitas fiskal di tengah tekanan penerimaan negara, ketidakpastian global, dan besarnya kebutuhan pembiayaan program strategis nasional. Namun, di sisi lain, rentang yang lebar juga menunjukkan tingginya ketidakpastian fiskal yang masih harus dihadapi daerah.

"Kalau penerimaan negara membaik, TKD mungkin akan mendekati batas paling atas. Tapi kalau tekanan fiskal meningkat, daerah harus siap transfernya berada di limit paling bawah," katanya.

Menurut Herman, kondisi tersebut menunjukkan kendali fiskal tetap berada di peme-

rintah pusat. Daerah dinilai belum memiliki kepastian penuh terhadap kapasitas fiskal yang akan diterima, meskipun beban pelayanan publik yang harus dijalankan tetap besar.

Apalagi, ia juga menilai TKD saat ini lebih ditempatkan sebagai instrumen kebijakan nasional untuk memastikan agenda prioritas pemerintah pusat berjalan di daerah. Meski secara administratif sistem pemerintahan tetap desentralistis, pengendalian fiskal dinilai semakin tersentralisasi.

Herman mengingatkan, apabila pemangkasan TKD terus berlanjut, dampaknya akan langsung terasa terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, masih memikul kewenangan besar dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, dalam rapat dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR, Senin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan TKD Rp 10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan, dana itu harus benar-benar dipakai pemerintah daerah untuk penangan dan pemulihan wilayah terdampak. (BOW)